



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

2021

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
(021) 5730119
JAKARTA**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	SOP.5/HUMAS/PPID/HMS.3/5/2021
Tgl. Pembuatan	1 Juli 2019
Tgl. Revisi	31 Mei 2021
Revisi Ke	1
Tgl. Efektif	1 Juni 2021

Disahkan Oleh

Kepala Biro Humas
Selaku PPID utama

Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730130 199803 1 004

Nama SOP

UJI KONSEKUENSI PENGECEUALIAN
INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPeraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PublikPeraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK/SETJEN/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana.Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik.
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengajuan Keberatan Atas Pelayanan Informasi PublikSOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">Lembar Kerja / Rencana Kerja dan AnggaranTerm of ReferenceKomputer/Printer/ScannerJaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila uji konsekuensi informasi publik terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan pemenuhan informasi publik akan tertunda	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

DAFTAR ISI

HALAMAN

- A. HALAMAN JUDUL
- B. LEMBAR PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
 - 1. TUJUAN
 - 2. RUANG LINGKUP
 - 3. REFERENSI
 - 4. ISTILAH DAN DEFINISI
 - 5. TANGGUNG JAWAB
 - 6. URAIAN PROSEDUR
 - 6.1 Urutan Pekerjaan
 - 6.2 Unit Kerja / Petugas Terkait
 - 6.3 Waktu Penyelesaian
 - 6.4 Perlindungan Kepemilikan Pemohon dan Pemenuhan Informasi
 - 6.5 Perlindungan Produk
 - 6.6 Monitoring dan Analisis Data
 - 7. DOKUMEN TERKAIT
 - 8. BAGAN ALIR PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

1. TUJUAN

Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik disusun sebagai panduan untuk menetapkan informasi publik yang akan ditutup atau tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dalam tertib administrasi dan tertib pelayanan serta keseragaman pola kerja.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup urutan pekerjaan, unit kerja/petugas terkait, waktu penyelesaian, perlindungan informasi yang dilakukan uji konsekuensi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. REFERENSI

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK/SETJEN/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. Bagian PPIP adalah Bagian Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik
- 4.2. Kabag adalah Kepala Bagian
- 4.3. Kasubbag PIP adalah Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik
- 4.4. Staf adalah operator Pengumpul / Pengolah / Penyaji Bahan Pelayanan Informasi Publik
- 4.5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikuasai, diterima oleh Biro Humas KLHK dengan penyelenggaraan tugas
- 4.6. Pelayanan pemenuhan informasi publik adalah pemenuhan permohonan semua tulisan yang ditulis di atas lembaran kertas/elektronik mengenai aktivitas data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia.
- 4.7. Pemohon informasi publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik.

4.8. PPID Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap unit Eselon II yaitu Sekditjen, Sekitjen, atau Sekbadan.

4.9. Simbol-simbol yang digunakan dalam prosedur ini adalah sebagai berikut :

-  Simbol "Operation" : menunjukkan suatu pekerjaan diluar kegiatan pemeriksaan, penundaan, penyimpanan dan penyaluran.
-  Simbol "Inspection" : menunjukkan kegiatan pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas.
-  Simbol "Inspection Operation" : menunjukkan kegiatan pemeriksaan sekaligus operasi seperti memeriksa konsep surat dan menandatangani surat.
-  Simbol "Transportation" : menunjukkan arah suatu arus dokumen / proses suatu kegiatan.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Kepala Biro bertanggung jawab terhadap substansi Uji Konsekuensi Informasi Publik.
- 5.2. Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap proses uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik dan bertanggung jawab terhadap perlindungan produk/layanan serta monitoring dan analisis data yang dilaksanakan oleh Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik.
- 5.3. Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik dibantu para staf bertanggung jawab melaksanakan proses uji konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap perlindungan produk/layanan serta monitoring dan analisis data proses uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh para staf.
- 5.4. Kepala Subbagian TU bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kebenaran pengetikan dan formatnya serta proses administrasi.
- 5.5. Staf Pengagenda Surat Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab melaksanakan pencatatan : surat masuk perihal uji konsekuensi, disposisi, melampirkan kartu kendali, mendistribusikan surat, dan memberikan nomor surat.
- 5.6. Staf Pengagenda Surat Subbagian TU bertanggung jawab mengagendakan uji konsekuensi sebagai surat keluar secara manual maupun melalui Sistem

Informasi Kearsipan (SIK), memberikan nomor dan tanggal, serta mengarsip pelayanan uji konsekuensi.

- 5.7. Staf Penyaji Bahan Pelayanan Informasi bertanggung jawab menyiapkan bahan dan konsep uji konsekuensi, melakukan konfirmasi data, menyampaikan hasil uji konsekuensi publik.

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Urutan Pekerjaan

- 6.1.1. Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik memberikan disposisi penyusunan surat permohonan informasi yang akan dilakukan uji konsekuensi ke semua PPID Pelaksana lingkup Kementerian LHK.
- 6.1.2. Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik paling lama 4 (empat) jam kerja memberikan disposisi kepada staf Staf Penyaji Bahan Pelayanan Informasi untuk menyiapkan surat yang diajukan kembali kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik.
- 6.1.3. Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik mengoreksi atau menyetujui konsep surat, selanjutnya diajukan kepada Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik .
- 6.1.4. Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik paling lama 4 (empat) jam kerja melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan membubuhkan paraf pada konsep surat. Selanjutnya konsep surat disampaikan kepada Kepala Biro melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- 6.1.5. Kepala Subbagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan hasil kerja Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik , dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Biro paling lama 4 (empat) jam kerja.
- 6.1.6. Kepala Biro melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan menandatangani hasil kerja Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diproses lebih lanjut.
- 6.1.7. Kepala Subbagian Tata Usaha paling lama 4 (empat) jam kerja menyampaikan kepada staf pengagenda surat keluar untuk dicatat, dan dikirim oleh petugas caraka kepada PPID Pelaksana Unit Eselon I terkait.
- 6.1.8. PPID Pelaksana Unit Eselon I terkait paling lama 6 (enam) hari kerja mengirimkan jawaban berupa daftar informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi beserta alasan dan dasar hukumnya kepada Biro Humas.

- 6.1.9. Staf Pengagenda surat masuk menerima surat usulan uji konsekuensi informasi publik dari PPID Pelaksana Unit Eselon I terkait, mencatat, mengagendakan, memberikan lembar disposisi, kemudian menyerahkan kepada Karo Humas
- 6.1.10. Kepala Biro Humas memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan pembahasan uji konsekuensi informasi publik.
- 6.1.11. Karo Humas mengundang para PPID Pelaksana untuk melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- 6.1.12. Karo Humas memimpin rapat uji konsekuensi informasi publik, dan membuat berita acara hasil uji konsekuensi.

6.2. **Unit Kerja / Petugas Terkait**

Unit Kerja / Petugas yang terkait dengan proses uji konsekuensi informasi publik adalah:

1. PPID Pelaksana
2. Kepala Biro
3. Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik
4. Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik
5. Kepala Subbagian Tata Usaha
6. Staf Pelayanan Informasi Publik
7. Staf Pengagenda Surat Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik
8. Staf Pengagenda Surat Subbagian TU

6.3. **Waktu Penyelesaian**

Waktu penyelesaian proses uji konsekuensi informasi publik permohonan informasi sampai penetapan oleh Karo Humas selaku PPID Utama paling lama 4 hari kerja.

6.4. **Perlindungan Kepemilikan Pelanggan**

SubBagian Pelayanan Informasi Publik harus menjaga properti milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digunakan selama proses uji konsekuensi informasi publik, baik itu berupa barang milik negara, dokumen atau hak intelektual ataupun data personal. Kepemilikan informasi tersebut harus diidentifikasi, dikendalikan, dan dilindungi agar tidak rusak atau hilang dan menjaga keberadaannya.

6.5. **Perlindungan Produk**

Perlindungan produk pada setiap level struktural di Biro Hubungan Masyarakat dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan untuk menjaga kesesuaian terhadap persyaratan uji konsekuensi informasi publik dengan melakukan pengendalian rekaman ataupun pemeriksaan.

6.6. **Monitoring dan Analisis Data**

- 6.6.1. Untuk keperluan monitoring proses uji konsekuensi informasi publik yang berlangsung, SubBagian Pelayanan Informasi Publik melakukan pencatatan-pencatatan sesuai dengan kondisi dan tahapannya dan dituangkan dalam catatan normal ataupun elektronik pada web PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6.6.2. Secara keseluruhan perkembangan perlindungan dalam pelayanan informasi yang dikecualikan direkap dalam **Form Monitoring Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik oleh PPID di Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik (LHK-14.03.CFM.01)**.

BAGAN ALIR PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Urutan Pekerjaan	Petugas Terkait							Waktu
		Staf Pengaganda Surat Bagian PPIP	Staf Penyaji Bahan Pelayanan Informasi	Kasubbag PIP	Kasubbag TU	Kabag PPIP	Karo	PPID Pelaksana Es I	
1	Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik memberikan disposisi penyusunan surat permohonan informasi yang akan dilakukan uji konsekuensi ke semua PPID Pelaksana			○		○			
2	Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik paling lama 4 (empat) jam kerja memberikan disposisi kepada staf Staf Penyaji Bahan Pelayanan Informasi untuk menyiapkan surat yang diajukan kembali kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik		○						4 jam
3	Kepala SubBagian Pelayanan Informasi Publik mengoreksi atau menyetujui konsep surat, selanjutnya diajukan kepada Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik			□					
4	Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik paling lama 4 (empat) jam kerja melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan membubuhkan paraf pada konsep surat. Selanjutnya konsep surat disampaikan kepada Kepala Biro melalui Kepala Subbagian Tata Usaha					□			4 jam
5	Kepala Subbagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan hasil kerja Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Biro paling lama 4 (empat) jam kerja					□			4 jam
6	Kepala Biro melakukan pemeriksaan dan memberikan koreksi bila diperlukan atau menyetujui dan menandatangani hasil kerja Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diproses lebih lanjut						□		

